

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikukuhkan dengan undang-undang (UU) telah membawa konsekuensi sendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat terlaksana secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah daerah yang direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah yang direvisi dengan UU No 33 Tahun 2004.

UU No 33 Tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*). Antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mana pada penelitian ini menjadi variabel bebas yang terdiri atas Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Diharapkan dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dapat meningkatkan investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketimpangan infrastruktur yang terdapat di setiap daerah akan dapat diatasi serta agar terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang merata, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. pemerintah pusat mengeluarkan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sehingga ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi dapat diatasi.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk asli daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah

dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Sedangkan Dana Bagi hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perekonomian Provinsi Jawa Barat didominasi oleh kategori Industri Pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta kategori Konstruksi. Keempat kategori tersebut menyumbang 75,20 persen dari total perekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi yang beragam terhadap total perekonomian di Provinsi tersebut. Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat sebesar 17, 01 persen. Sementara, kabupaten/ kota Bandung memberikan kontribusi terhadap perekonomian 13, 54 persen dan kabupaten/ kota Bogor memberikan kontribusi terhadap perekonomian 11,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 berada dalam rentang cukup lebar yaitu antara 2 sampai 8 persen. Hal itu mengindikasikan adanya ketidak merataan pembangunan di Provinsi Jawa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kota Bandung 7,63 persen, sementara

pertumbuhan terendah oleh kabupaten Indramayu 2,16 persen.

<http://www.bps.go.id>

Perekonomian provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 berbeda dengan tahun 2015 dimana total perekonomiannya ditahun 2014 terdapat 3 kategori yaitu lapangan usaha menyumbangkan 67, 59 persen sedangkan pada tahun 2015 total perekonomiannya terdapat 4 kategori yaitu lapangan usaha menyumbangkan 75, 20 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ditahun 2014 lebih tinggi dibanding tahun 2015 yaitu berkisar antara 0, 23 persen sampai dengan 17, 27 persen.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan pendapatan yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 didorong oleh aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat, diantaranya merupakan daerah yang memiliki potensi pendapatan asli daerah yang baik, sehingga diharapkan menjadikan salah satu daerah yang mandiri. <http://www.bps.go.id>

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gunantara dkk (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda ditemukan oleh

penelitian yang dilakukan Abrar, 2010 dalam Suwandika dkk, 2015 yang memperoleh hasil bahwa hubungan pendapatan asli daerah mempunyai dampak negatif dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Uhise (2013) menyatakan bahwa hasil analisa menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari Penelitian yang dilakukan oleh Gunantara dkk (2014) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda ditemukan oleh penelitian yang dilakukan Setyawati dan Hamzah (2007) yang memperoleh hasil bahwa hubungan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Gunantara, 2014 tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi di Bali. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di Provinsi Bali dengan 9 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Provinsi Jawa Barat dengan 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian Gunantara dan Dwirandra 2014 menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pertumbuhan

ekonomi. Pada penelitian ini menghilangkan variabel belanja modal sebagai variabel pemoderasi karena pada penelitian yang dilakukan oleh Gunnatara dkk (2014) belanja modal tidak mampu memoderasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dari penelitian yang dilakukan oleh Uhise (2013) karena belanja modal tidak mampu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan kajian ulang lebih mendalam tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi terutama mengenai efisiensi dan efektifitasnya. Sedangkan alasan menambahkan variabel dana alokasi khusus karena dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan menambahkan variabel DAK dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui terjadinya pemerataan dalam pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat. Penambahan variabel dana bagi hasil pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui seberapa potensi daerah penghasilan pada Provinsi Jawa Barat.

Adapun alasan peneliti tertarik menggunakan Provinsi Jawa Barat, sebagai tempat penelitian karena provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang cukup tinggi pertumbuhan ekonominya. Selain itu, supaya bisa memahami seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, dengan berbagai masalah dan latar belakang yang terdapat di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini penting dilakukan karena digunakan sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi yang optimal,

dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya sumber dana yang diperlukan dalam membiayai anggaran daerah, serta sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan pada pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Memberikan bukti empiris bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Memberikan bukti empiris bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Memberikan bukti empiris bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan teori akuntansi sektor publik, pentingnya pengungkapan pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan literatur dan pembanding untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang sektor publik, khususnya menganalisis lebih dalam pentingnya pengungkapan pertumbuhan ekonomi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meringankan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan situs resminya dalam penyampaian informasi serta mengambil kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi.